

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
MELALUI LAYANAN SAMSAT KELILING DI KANTOR BERSAMA
SAMSAT KOTA BATU**

**Diajukan untuk memperoleh gelar
Sarjana Administrasi Publik**



**OLEH:
YULIUS INDRA KAKA
2017210183**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI**

MALANG

2022

RINGKASAN

Dalam hidup bernegara tentu tidak akan terlepas dari kegiatan pelayanan publik. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun (1945) bahwa negara wajib melayani setiap warga negara nya dan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Batu.

Penelitian ini menggunakan data-data empiris di lapangan. Dalam mengkaji permasalahan yang ada. Hal ini sesuai dengan definisi penelitian kualitatif menurut Masyuri dan Zainudin (2008:13) yang mengatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang memecahkan masalah dengan menggunakan data empiris.

Kata Kunci: Pelaksanaan Pelayanan Pembayaran Pajak.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi pelaksanaan pematuhan sebuah aturan dalam berkendara, hal tersebut merupakan sebuah kunci dasar bagi daerah untuk memperoleh atau meningkatkan hasil APBD. Pajak berkendara yang dilakukan dengan mekanisme yang telah di tetap. Hal ini diprioritaskan dan roda 4 dan roda 6. Bertolak pada pada sebuah problematika yang terjadi secara global pada saat ini, semakin banyaknya jumlah kendaraan yang terdapat di berbagai daerah.

Sebagai instansi yang berkewenangan dalam pelayanan dan pembuatan administratif berkendara, maka dapat diberikan ketegasan kepada para pengendara untuk menaati sebuah regulasi.

Permasalahan yang terjadi setiap instansi pada saat ini terutama Samsat adalah pajak yang wajib bagi pengguna kendaraan bermotor.

Pelayanan publik memiliki peranan besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di beberapa bidang infrastruktur maupun di bidang kesehatan, baik dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya dan lain sebagainya.

ada begitu banyak persoalan yang ditemukan serta keresahan dari masyarakat dalam tingkat proses pelayanan publik baik dalam pelaksanaan. baik dari langkah yang dipersulit, baik dalam sistem antrian yang memakan waktu yang cukup lama di setiap pelayanan yang ada, serta sarana dan prasarana dalam pelayanan yang tidak terlalu mencukupi, banyaknya masyarakat yang memiliki kemauan untuk menerima pelayanan yang baik dari suatu lembaga, sehingga masih

terjadi sistem pungli dan masih ada juga sistem jasa perantara dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Permasalahan tersebut seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab pada setiap lembaga tertentu yang mesti menyelesaikan permasalahan yang ada, bukan hanya pada lembaga Pusat dan lembaga di setiap daerah ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dan bukan hanya pelayanan publik. Adapun yang terjadi pada setiap daerah, memiliki kesamaan dalam sistem pelayanan publik dalam berbagai jenis administrasi yang ada pada pemerintah Kota Batu itu sendiri. Pemerintah Kota Batu yang memiliki angka penduduk yang cukup banyak sehingga membutuhkan pelayanan administrasi publik yang cepat dan tepat sasaran. Diantaranya yaitu pelayanan publik yang dilaksanakan oleh instansi. Hal seperti ini sehingga instansi selalu tidak ada hentinya dalam memberi pelayanan kepada masyarakat, Perpanjangan secara terus menerus. Disisi lain masyarakat selalu memiliki kebutuhan tersendiri sehingga banyak efek negatif, seperti antrian panjang. Hal ini menjadi upaya dalam mengatasi masalah tersebut, perlu ada suatu yang baru dalam pelayanan seperti Samsat Keliling, Samsat Keliling inilah yang melayani masyarakat dalam pengesahan STNK/Pembayaran Pajak pada kendaraan bermotor.

1.2 Rumusan masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Samsat Keliling?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Samsat Keliling Kota Batu?

1.3 Tujuan penelitian

1. Menjelaskan Pelaksanaan pembayaran Samsat keliling kantor Samsat Kota Batu.
2. Pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan layanan Samsat Keliling bersama Kota Batu?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Dapat memperluaskan pengetahuan wawasan mengetahui Keliling.
2. Manfaat Praktis. Bagi instansi khususnya, melalui Keliling.
3. Selain itu, juga, pertimbangan bagi instansi melalui Keliling.

DAFTAR PUSTAKA

- Ancok, Djamaludin. 2012 *Kepemimpinan dan Inovasi*. Penerbit Erlangga.
- Anwar, Mujib. 2015. *Sumbangan Pajak Kendaraan Bermotor Ke Pemprov Jatim Tertinggi*.<http://www.tribunnews.com/regional/2015/01/04/sumbangan-pajak-kendaraanbermotor-ke-pemprov-jatim-tertinggi>. Diakses pada 18 Oktober 2015
- Hidayat, Isna Khoirul, Rahayu, Sugi. *Good Tourism Governance Dalam Pengelolaan Kampung Wisata Di Kawasan Kotagede Kota Yogyakarta*. Fakultas Ilmu Sosial UNY, 2016.
- Indriantoro, Nur, dan Bambang Supomo, 1999, *Metodologi Penelitian dan Bisnis*, Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Ilyas dan Burton, Richard, 2008, *Hukum Pajak Edisi 4*, Jakarta : Salemba Empat
- Kurniawan dan Purwanto, 2004, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia, Malang* : Bayumedia
- Lukman, Mediya. 2013. *Badan Layanan Umum Dari Birokrasi Menuju Korporasi*. Jakarta : Pt Bumi Aksara.
- Masyhuri dan M. Zainuddin. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Teori dan Aplikasi*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Moeleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Remaja Rosdakarya
- Muluk, Khairul. 2009. *Knowledge Management Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah*. Jatim : Bayumedia Publising
- Nurmantu, Safri. 2011. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Granit
- Rahmayanti, Nina. 2013. *Manajemen Pelayanan Prima*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Sari, R.A.Vivi Yulian dan Neri Susanti. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma*. Jurnal Review. Universitas Dehasen Bengkulu.
- Susilawati dan Budiarta. 2013. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak. Pengetahuan Pajak. Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan

- Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.2 2013, 345-357. ISSN : 2302-8556
- Said, M. Mas’ ud 2007. Birokrasi di Negara Birokratus. Malang: UMM Press
- Sinambela, Poltak Lijan dkk. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Sinambela, Poltak Lijan dkk. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Rahmayanti, Nina. 2013. *Manajemen Pelayanan Prima*. Yogyakarta : Graha Ilmu SI Djajadiningrat dalam berita acara (2017: 1),
- Suryarini, Trisni dan Tarsis Tarmudji. 2012. Pajak di Indonesia. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Suandy, Erly, 2005, Hukum Pajak, Jakarta : Salemba Empat
- Ummah, Muslikhatul. 2015. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak. Sanksi Pajak. Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang”. Fakultas Ekonomi Universitas Dian Nuswantoro. Semarang. Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Kotler, Philip. 2005. Manajemen Pemasaran. Jilid 1 dan 2. Jakarta: PT. Indeks Kelompok: Gramedia.